

Pengaruh Cost Recovery Terhadap Pendapatan Perusahaan dan Government Take pada PT Chevron Pacific Indonesia

by Kasman Arifin

Submission date: 27-Nov-2018 04:47PM (UTC+0800)

Submission ID: 1045571457

File name: pengaruh_cost_kiat.pdf (138.28K)

Word count: 4913

Character count: 28866

Pengaruh *Cost Recovery* terhadap Pendapatan Perusahaan dan *Government Take* pada PT Chevron Pacific Indonesia

JAM
12, 4

Diterima, Januari 2014
Direvisi, Maret 2014
Juni 2014
Desember 2014
Disetujui, Desember 2014

Kasman Arifin ZA

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau Pekanbaru

Iqbal Maulana Arifin

Pascasarjana PPM Jakarta

Abstract: The aims of this study are: 1) analyzing empirically and examining the effect of cost recovery on APBN 2) analyzing empirically and examining the effect of cost recovery on sharing holder fund. Analysis unit of this research is upstream of oil and gas industry that is managed by Indonesian government with Production Sharing Contract for 44 companies or operator production sharing contract. The population of this research obtains from operator production sharing contract and BPMIGAS on manager level 62 persons, professional 51 persons and researcher from university 18 persons. The researcher was also secondary data during the year 1984 to 2009. The results show that six variables seemingly have directly significant relationship path and four variables show insignificant pattern of relationship. Variable which has effect is cost recovery to sharing holder fund, and the variable which do not have an effect is cost recovery to APBN.

Keywords: cost recovery, APBN, dana bagi hasil

Abstrak: Penelitian bertujuan untuk: 1) menganalisis secara empiris dan menguji pengaruh *cost recovery* terhadap APBN 2) menganalisis secara empiris dan menguji pengaruh *cost recovery* terhadap Dana Bagi Hasil. Unit analisis dari penelitian ini adalah industri hulu minyak dan gas yang dikelola oleh pemerintah Indonesia dengan sistem Kontrak Bagi Hasil dengan 44 perusahaan atau operator kontraktor kontrak kerja sama. Populasi penelitian adalah mereka yang bekerja atau sebagai operator dari kontraktor kontrak kerjabsama dan BPMIGAS dengan tingkatan manajer 62 orang, profesional 51 orang dan peneliti yang berasal dari universitas 18 orang. Dan juga peneliti menggunakan data sekunder yang ada di BPMIGA dalam rentang waktu 1984–2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa enam variabel yang mempunyai atau memiliki jalur ber hubungan langsung yang signifikan dan empat variabel menunjukkan pola hubungan tidak signifikan. Variabel yang berpengaruh adalah *cost Recovery* untuk Dana Bagi Hasil, dan variabel yang tidak berpengaruh adalah *cost recovery* ke APBN.

Kata Kunci: biaya pemulihan, APBN, dana bagi hasil

Sampai saat ini peranan minyak dan gas bumi masih dominan bagi pembangunan nasional, yaitu sebagai pemberi kontribusi yang cukup besar dalam APBN (Anggaran

Pendapatan Belanja Negara), sebagai penghasil devisa, penyedia energi dalam negeri dan sebagai penyedia bahan baku industri.

Industri minyak dan gas bumi itu sendiri meliputi usaha pencarian (*exploration*), pengembangan (*development*), pengolahan (*refinery*), serta usaha



Jurnal Aplikasi
Manajemen (JAM)
Vol 12 No 4, 2014
Terindeks dalam
Google Scholar

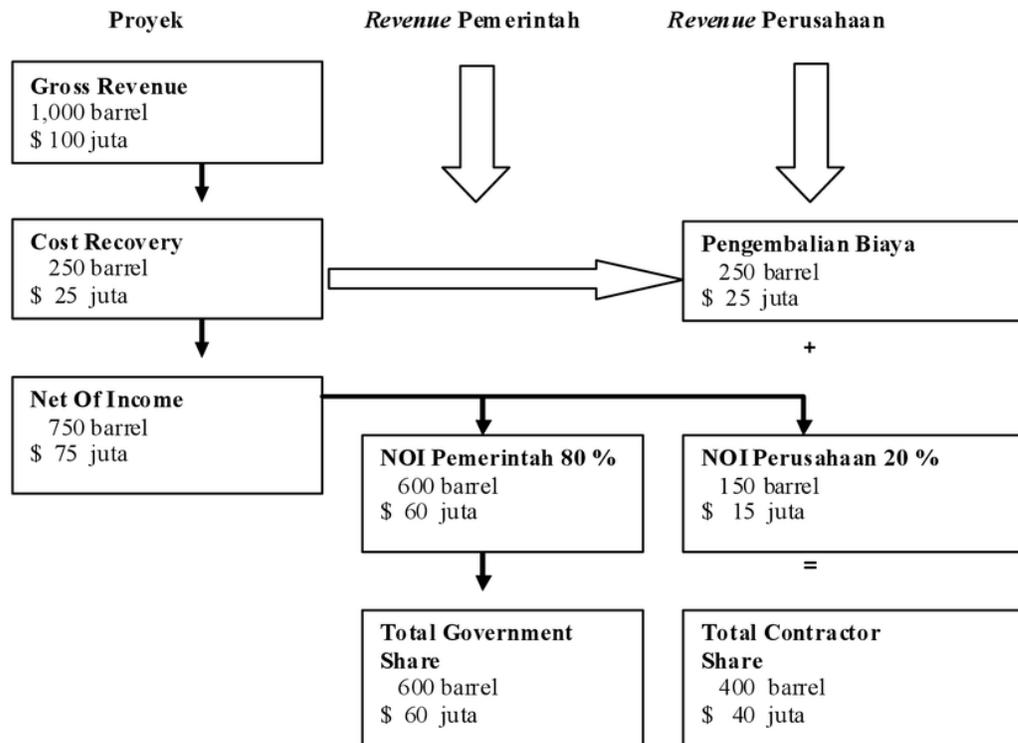
Alamat Korespondensi:
Kasman Arifin ZA, Fakultas
Ekonomi Universitas Islam
Riau Pekanbaru

angkutan (*tanker*), dan pemasarannya. Secara garis besar kegiatan tersebut dibagi atas dua bagian yaitu pertama, yang disebut dengan *upstream industry* atau industri hulu, yang dikelola oleh SKKMIGAS meliputi aktivitas eksplorasi dan eksploitasi. Kedua *downstream industry* atau kegiatan hilir yang dikelola oleh BPH (Badan Pengelola Hilir) yang pada dasarnya kedua badan tersebut merupakan perpanjangan tangan pemerintah dalam mengelola industri minyak dan gas bumi di Indonesia.

Pada industri hulu migas di Indonesia mengenal istilah *Cost Recovery* yang artinya adalah revenue (yang diterima oleh perusahaan perminyakan) untuk menutupi pengeluaran biaya kapital dan biaya operasi dalam suatu tahun tertentu ditambah (sisa) *unrecovered costs* dari tahun sebelumnya.

Di Indonesia sejak diberlakukannya Undang-undang No 8 Tahun 1971 yang dikenal dengan

Production Sharing Contract (PSC), di mana revenue yang diterima oleh perusahaan migas tidak secara langsung merupakan hasil perkalian produksi dengan harga. Karena pada dasarnya perusahaan tersebut tidak memiliki minyak, dan mereka memperoleh upah (*fee*) yang antara lain berupa *cost recovery* dan *contractor share of profit oil*. Dalam beberapa *PSC*, biaya kapital didepresiasi dan jumlah depresiasinya dapat dikembalikan atau diambil dari revenue. *Revenue* sesudah dikurangi *recoverable cost* disebut *profit oil* yang harus dibagi antara pemerintah dan kontraktor. Perusahaan memperoleh bayaran (*fee*) sebagai kom-pensasi mengusahakan migas yaitu dari *cost recovery* dan *split of profit oil* sedangkan pemerintah akan menerima sisanya yang disebut *government take*. Alur pembagian ini secara sederhana dapat digambarkan sebagaimana gambar 1.



Gambar 1. Alur Pendapatan Berdasarkan PSC

Dalam contoh yang diasumsikan dalam pembagian jumlah produk, maka *gross revenue* berjumlah 1.000 barrel dengan *cost recovery* sejumlah 250 barrel. Artinya, pada titik *revenue* yang diterima perusahaan adalah sebanyak 1.000 barrel. *Net Of Income* yang tersedia untuk pemerintah dan perusahaan adalah sejumlah 750 barrel. Apabila diasumsikan, pembagian antara pemerintah dan perusahaan adalah 80:20, maka pemerintah akan memperoleh 600 barrel minyak mentah dan perusahaan akan memperoleh 150 barrel minyak mentah.

Apabila pembagiannya diasumsikan dalam jumlah nominal keuangan, maka *gross revenue* adalah \$100 juta dengan *cost recovery* \$25 juta. Artinya, pada titik *revenue* yang diterima perusahaan adalah sebesar US\$ 100 juta. *Net Of Income* yang tersedia untuk pemerintah dan perusahaan adalah sebesar US\$ 75 juta. Apabila diasumsikan, pembagian antara pemerintah dan perusahaan adalah 80:20, maka pemerintah akan memperoleh US\$ 60 juta dan perusahaan sebesar US\$ 15 juta.

PT CPI dalam menjalankan operasinya tidak terlepas dari biaya-biaya, baik biaya operasi maupun biaya kapital. Biaya Kapital atau Biaya investasi merupakan ongkos sekali saja (*one-off cost*), yang muncul pada awal suatu proyek. Di dalam perusahaan minyak bumi biasanya biaya ini cukup besar, yang dikeluarkan jauh sebelum *revenue* pertama diperoleh. Biaya Kapital ini sering disebut *capital expenditure* atau *development expenditure* terdiri dari biaya pemboran, tanker, anjungan lepas pantai, kepala sumur dan *flow line* dan lain-lain yang berkaitan dengan pengembangan lapangan dan proses produksi.

Biaya-biaya inilah yang mempengaruhi besarnya *Cost Recovery* terhadap perusahaan tersebut. *Cost Recovery* timbul karena adanya biaya operasi dan biaya kapital yang sangat besar sebelum perusahaan tersebut memperoleh laba atau keuntungan.

Berdasarkan fenomena di atas bahwa ada hubungan yang kuat antara *cost recovery* atau pengembalian biaya dengan pendapatan perusahaan

yang berdasarkan kontrak bagi hasil menjadi *equity to be split* dan bagian pemerintah (*government take*).

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui bagaimanakah dampak perubahan *cost recovery* terhadap Pendapatan Perusahaan dan Bagian Pemerintah (*Government Take*) (2) Untuk mengetahui berapa besar pengaruh yang ditimbulkan dari *cost recovery* terhadap Pendapatan Perusahaan dan Bagian Pemerintah (*Government Take*) pada PT CPI.

METODE

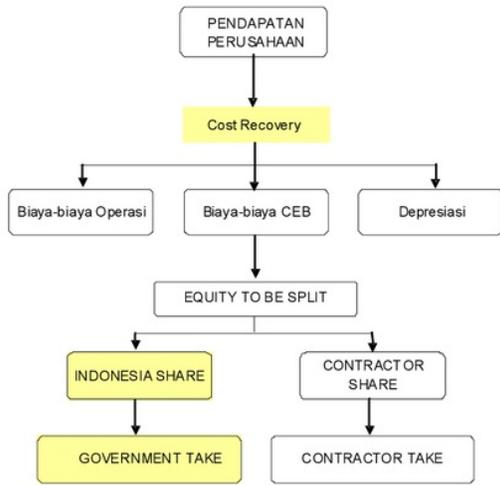
Kerangka Pemikiran

Untuk mempertahankan ke-ekonomian sumber daya alam di suatu negara, sebelum dilakukan penandatanganan kontrak (*petroleum contracts*) hasil negosiasi terlebih dahulu pemerintah berkonsultasi dengan akuntan negara dan analis keuangan atau penasihat keuangan untuk meminta pendapatnya yang berhubungan dengan terminologi yang berhubungan dengan nilai ke-ekonomian suatu lahan atau wilayah kerja pertambangan.

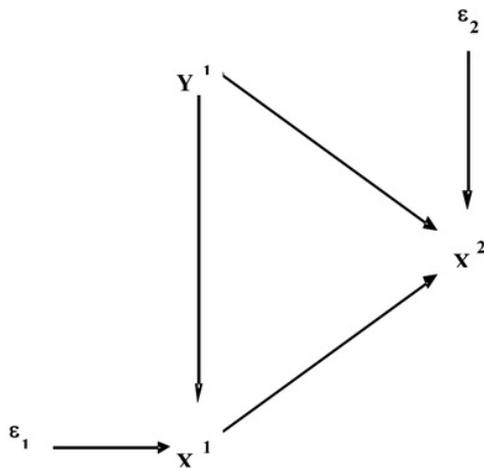
Ilmu pengetahuan tentang *petroleum engineering* selalu lebih maju dalam analisa dan desain dibandingkan dengan pengetahuan lainnya. Salah satu aspek kunci yang tidak pernah ditinggalkan adalah standar terminologi dengan sistem analisis fiskal. Kadangkala orang menggunakan istilah "government take" untuk mengidentifikasi komponen pendapatan bukan keuntungan. Dari analisa satu per satu komponen pendapatan tidak mempunyai arti yang besar. Fenomena ini diambil dengan menggunakan parameter seperti *reservoir (Reservoir-Engineering)* dan *Contract (Science of Petroleum Fiscal System Analysis)*.

Dari fenomena di atas dapat dibuat suatu kerangka atau model penelitian sebagaimana gambar 2.

Masing-masing entitas saling berhubungan secara resiprokal antara satu dengan yang lainnya, dan dapat digambarkan dalam bentuk kerangka konseptual penelitian sebagaimana gambar 3.



Gambar 2.



Gambar 3.

Catatan:

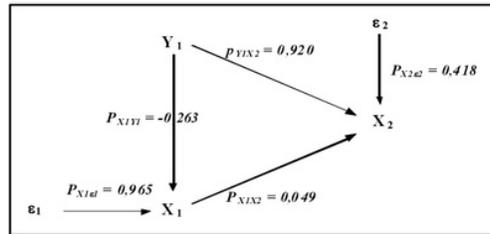
- Y_1 = *Cost Recovery*
- X_1 = Pendapatan Perusahaan
- X_2 = *Government Take*

HASIL

Hasil Uji Kausatif (Analisa Jalur) Pengaruh *Cost Recovery* terhadap Pendapatan Perusahaan dan *Government Take*

Hasil penelitian ini menyajikan hasil analisis jalur (*path analysis*) pengaruh *Cost Recovery* terhadap

Pendapatan Perusahaan serta pengaruh *Cost Recovery* dan Pendapatan Perusahaan dan *Government Take*. Hasil *path analysis* untuk struktur pengaruh yang diuji secara ringkas dapat dilihat pada Gambar 4 berikut:



Gambar 4. Diagram Jalur Hasil Analisis

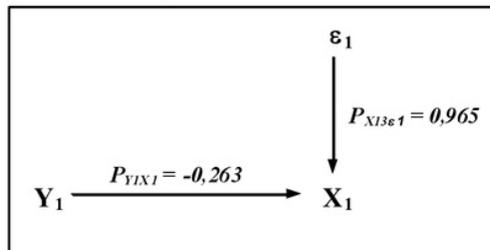
Persamaan struktural yang menunjukkan hubungan kausatif antar variabel dari diagram di atas adalah sebagai berikut:

Persamaan Substruktur 1
 $X_1 = p_{X_1Y_1} * Y_1 + e_1, R^2$
 $X_1 = -0,263 * Y_1 + e_1, R^2 = 0,069$

Persamaan Substruktur 2
 $X_2 = p_{X_2Y_1} * Y_1 + p_{X_2X_1} * X_1 + e_2, R^2$
 $X_2 = 0,920 * Y_1 + 0,049 * X_1 + e_2, R^2 = 0,826$
 di mana:

- p : koefisien jalur yang menunjukkan kuatnya pengaruh variabel penyebab
- e_i : galat/residu/error substruktur ke-i
- R^2 : koefisien determinasi multipel yang menunjukkan besarnya pengaruh seluruh variabel penyebab yang terlibat pada suatu substruktur
- Y_1 : *Cost Recovery*
- X_1 : Pendapatan Perusahaan
- X_2 : *Government Take*

Hasil Analisis pada Substruktur 1



Gambar 5. Diagram Jalur Substruktur 1

Persamaan Substruktur 1

$$Y_1 = p_{X_1Y_1} * X_1 + e_1, R^2$$

$$Y_1 = -0,263 * X_1 + e_1, R^2 = 0,069$$

di mana:

(Y_1) : *Cost Recovery*

(X_1) : Pendapatan Perusahaan

Dalam diagram jalur, ada-tidaknya pengaruh *Cost Recovery* (Y_1) terhadap Pendapatan Perusahaan (X_1) diuji melalui uji signifikansi koefisien jalur $p_{X_1Y_1}$. Dari hasil analisis diperoleh nilai koefisien jalur $p_{X_1Y_1} = -0,263$ dengan nilai statistik-t = -1,189. Hasil deskripsi atas sampel menunjukkan bahwa besarnya pengaruh *Cost Recovery* (Y_1) terhadap Pendapatan Perusahaan (X_1) hanya sebesar $R^2 = p_{X_1Y_1}^2 = (-0,263)^2 \times 100\% = 6,9\%$. Besarnya pengaruh ini menggambarkan proporsi variasi Pendapatan Perusahaan dalam data sampel yang dapat dijelaskan oleh *Cost Recovery*. Sisa proporsi variasi Pendapatan Perusahaan, sebesar $1 - R^2 = p_{X_1Y_1}^2 = 0,931$ atau 93,1% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti.

Mengkaji nilai statistik-t yang dihasilkan tampak bahwa nilai $t_{hitung} = -1,189$ lebih besar daripada $-t_{tabel} = -2,093$ (nilai t_{tabel} pada taraf kesalahan 5% dan derajat bebas $db = n-2 = 19$ untuk tipe uji dua sisi) yang menunjukkan bahwa *Cost Recovery* (Y_1) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Perusahaan (X_1) pada taraf kesalahan 5%. Secara ringkas, hasil uji signifikansi pengaruh *Cost Recovery* (Y_1) terhadap Pendapatan Perusahaan (X_1) disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Uji Signifikansi Pengaruh Substruktur 1

Pengaruh	$p_{X_1Y_1}$	t	$t_{0,025(19)}$	Keputusan
<i>Cost Recovery</i> (Y_1)	-0,263	-1,189	-2,093	Non-sig.

Ketidak-pengaruh *Cost Recovery* (Y_1) terhadap Pendapatan Perusahaan (X_1) menunjukkan bahwa *Cost Recovery* yang lebih tinggi tidak cenderung menghasilkan Pendapatan Perusahaan yang lebih rendah atau lebih tinggi.

Ada-tidaknya pengaruh *Cost Recovery* (Y_1) dan Pendapatan Perusahaan (X_1) secara simultan terhadap *Government Take* (X_2) diuji melalui uji signifikansi koefisien determinasi multipel R^2 . Dari hasil analisis diperoleh nilai koefisien determinasi multipel $R^2 = 0,826 = 82,6\%$ dengan nilai statistik-F = 42,590. Hasil

deskripsi sampel ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh *Cost Recovery* (Y_1) dan Pendapatan Perusahaan (X_1) secara simultan terhadap *Government Take* (X_2) sebesar 82,6%. Besarnya pengaruh ini menggambarkan proporsi variasi *Government Take* dalam data sampel yang dapat dijelaskan oleh *Cost Recovery* dan Pendapatan Perusahaan secara simultan. Sisa proporsi variasi *Government Take*, sebesar $1 - R^2 = p_{X_2Y_1}^2 = 0,174$ atau 17,4% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti.

Dari hasil uji signifikansi diperoleh bahwa F_{hitung} lebih besar daripada $F_{tabel} = 3,555$ (nilai F_{tabel} pada taraf kesalahan 5% dan derajat bebas $db_1 = k = 2$, $db_2 = n-k-1 = 18$) yang menunjukkan bahwa *Cost Recovery* (Y_1) dan Pendapatan Perusahaan (X_1) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap *Government Take* (X_2) pada taraf kesalahan 5%. Secara deskriptif, merujuk kepada nilai koefisien korelasi multipel ($\bar{O}R^2$) yaitu sebesar $R = 0,909$ menunjukkan bahwa pengaruh kedua variabel penyebab tersebut secara simultan tergolong sangat kuat (Guilford, 1956: 145).

Ada-tidaknya pengaruh *Cost Recovery* (Y_1) dan Pendapatan Perusahaan (X_1) secara parsial terhadap *Government Take* (X_2) diuji melalui uji signifikansi koefisien jalur $p_{X_2Y_1}$ dan $p_{X_2X_1}$. Dari hasil analisis diperoleh nilai koefisien jalur $p_{X_2Y_1} = 0,920$ dengan nilai statistik-t = 9,018 dan koefisien jalur $p_{X_2X_1} = 0,049$ dengan nilai statistik-t = 0,479. Hasil deskripsi atas sampel menunjukkan bahwa besarnya pengaruh langsung *Cost Recovery* (Y_1) secara parsial terhadap *Government Take* (X_2) sebesar $p_{X_2Y_1}^2 = (0,920)^2 \times 100\% = 84,7\%$; sedangkan pengaruh langsung Pendapatan Perusahaan (X_1) hanya sebesar $p_{X_2X_1}^2 = (0,049)^2 \times 100\% = 0,2\%$.

Dari hasil uji signifikansi diperoleh bahwa t_{hitung} untuk *Cost Recovery* (Y_1) lebih besar daripada $t_{tabel} = 2,101$ (nilai t_{tabel} pada taraf kesalahan 5% dan derajat bebas $n-k-1 = 18$ untuk tipe uji dua sisi) yang menunjukkan bahwa *Cost Recovery* (Y_1) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap *Government Take* (X_2) pada taraf kesalahan 5%. Hasil yang berbeda ditunjukkan untuk Pendapatan Perusahaan (X_1) di mana nilai t_{hitung} lebih kecil daripada $t_{tabel} = 2,101$ yang menunjukkan bahwa Pendapatan Perusahaan (X_1) tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap *Government Take* (X_2) pada taraf kesalahan 5%.

Secara ringkas, hasil uji signifikansi pengaruh *Cost Recovery* (Y_1) terhadap Pendapatan Perusahaan (X_1) dan *Government Take* (X_2), baik secara simultan maupun parsial disajikan dalam Tabel 2.

deskriptif hanya sebesar -1,2% yang jauh lebih kecil dibandingkan pengaruh langsung *Cost Recovery* terhadap *Government Take* yang sebesar 84,7%. Dapat disimpulkan bahwa eksistensi pengaruh tidak langsung

Tabel 2. Hasil Uji Signifikansi Pengaruh Substruktur 2

Pengaruh	$R^2_{X_2, Y_1 X_1}$	F	$F_{0,025(18,2)}$	Keputusan
Simultan	0,826	42,590	3,555	Sig.
Pengaruh Parsial	$p_{X_2 \dots}$	t	$t_{0,025(18)}$	Keputusan
<i>Cost Recovery</i> (Y_1)	0,920	9,018	2,101	Sig.
Pendapatan Perusahaan (X_1)	0,049	0,479	2,101	Non-sig.

Keberpengaruh *Cost Recovery* (Y_1) secara parsial terhadap *Government Take* (X_2) menunjukkan bahwa pada kondisi Pendapatan Perusahaan yang sama, *Cost Recovery* yang lebih tinggi cenderung menghasilkan *Government Take* yang lebih rendah atau lebih tinggi. Sedangkan ketidak-pengaruh Pendapatan Perusahaan (X_1) terhadap Pendapatan Perusahaan (X_1) menunjukkan bahwa pada kondisi *Cost Recovery* yang sama, Pendapatan Perusahaan yang lebih tinggi tidak cenderung menghasilkan *Government Take* yang lebih rendah atau lebih tinggi. Dari hasil analisis jalur ini dapat disimpulkan bahwa *Cost Recovery* secara dominan mempengaruhi *Government Take*.

Deskripsi pengaruh langsung dan tidak langsung berdasarkan data sampel yang menunjukkan dominannya pengaruh *Cost Recovery* (Y_1) terhadap *Government Take* (X_2) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Distribusi Kontribusi Pengaruh Substruktur 2

	Pengaruh Langsung	Pengaruh tidak langsung, melalui		Pengaruh Total
		X_1	X_2	
Y_1	84,7% +	-	-1,2% -	83,5% +
X_1	0,2% +	-1,2% -	-	-0,9% -
	Pengaruh total variabel Y_1 dan X_1 terhadap X_2			82,6%
	Pengaruh variabel lain terhadap X_2			17,4%
	Total			100,0%

Mengkaji perbandingan kontribusi besar pengaruh langsung dan tidak langsung, sebagaimana ditunjukkan oleh tabel di atas, dapat diketahui bahwa besar pengaruh tidak langsung dari *Cost Recovery* melalui Pendapatan Perusahaan terhadap *Government Take* secara

dari *Cost Recovery* melalui Pendapatan Perusahaan terhadap *Government Take* ini tidak dapat diterima dengan pertimbangan tidak signifikannya pengaruh *Cost Recovery* melalui Pendapatan Perusahaan yang telah diuji pada substruktur 1 maupun tidak signifikannya pengaruh Pendapatan Perusahaan secara parsial terhadap *Government Take* pada substruktur 2.

PEMBAHASAN

Dampak Perubahan *Cost Recovery* terhadap Pendapatan Perusahaan

Untuk mengetahui bagaimanakah dampak perubahan *cost recovery* terhadap perolehan laba operasi, berikut ini dapat dilihat pada Tabel 4, yaitu perbandingan laporan rugi laba pada Rokan PSC semenjak tahun 2010–2013 (Kasman 2014).

Pada laporan rugi laba untuk Rokan PSC ini, peneliti hanya memuat nilai dari *total lifting*, *total contractor* pendapatan perusahaan, total biaya operasi dan perolehan laba sebelum pajak. Adapun angka-angka yang peneliti pakai adalah simulasi yang bertujuan

agar memudahkan peneliti menganalisis bagaimana dampak perubahan *cost recovery* terhadap perolehan laba sebelum pajak.

59% *Direct OEB*, 8% *Indirect OEB*, 14,2% *CEB*, 35% *Depresiasi* dan sisanya 0,2% *Other Income (Expenditure)*. Sedangkan pada tahun 2005 *Cost*

Tabel 4. *Income Statement* pada PT Chevron Pacific Indonesia

PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA				
INCOME STATEMENT				
(US \$ 000,000.00)				
DESCRIPTION	2010	2011	2012	2013
PENDAPATAN PERUSAHAAN				
SALES PENDAPATAN PERUSAHAAN				
PERTAMINA LIFTING				
JOINT VENTURE-PART. LIFT				
CONTRACTOR LIFTING	4358.17	4086.49	2616.61	3682.97
TOTAL LIFTING				
PERTAMINA LIFTING-OFFSET				
CRUDE OVER/(UNDER) LIFTING				
OVERLIFT VALUE ADJUSMENT				
TOTAL CONTRACTOR ENTITLEMENT				
SALES-DMO CONTRACTOR OLD OIL				
SALES-DMO CONT. (10% OF WAP)				
SALES-DMO CONTRACTOR NEW OIL				
TOTAL CONTRACTOR PENDAPATAN PERUSAHAAN	1464.44	1418.92	1030.16	1334.41
OPERATING EXPENSE (OEB)				
TOTAL DIRECT OEB	413	448.35	352.59	482.79
TOTAL INDIRECT OEB	(56)	(68.36)	(48.80)	(80.47)
NET OPERATING EXPENSE (OEB)	99.4	213.15	203.44	251.05
CEB EXPENSE				
TOTAL EXPENSE PORTATION CEB				
DEPRECIATION	245	213.15	203.44	251.05
AMORTIZATION	0	0	0	0
OTHER INCOME (EXPENSE)	(14)	2.21	1.05	(1.61)
TOTAL OTHER INCOME/(EXPENSE)				
TOTAL COST RECOVERY	700	735	654.15	804.65
NET INCOME BEFORE TAX	764.44	683.92	376.01	529.76
TAXES				

Sumber: PT Chevron Pacific Indonesia (Simulasi)

Dari Tabel 4 di atas, dapat disusun kembali komposisi total *cost recovery* dan dapat dilihat persentase masing-masing komponen biaya pada Tabel 5.

Dari Tabel 5 (komposisi *expenditure*) tampak bahwa pada tahun 2004 *Cost Recovery* terdiri dari

Recovery terdiri dari 61% *Direct OEB*, 9,3% *Indirect OEB*, 19% *CEB*, 29% *Depresiasi* dan sisanya 0,3% *Other Income (Expenditure)*. Pada tahun 2006 *Cost Recovery* terdiri dari 53,9% *Direct OEB*, 7,46% *Indirect OEB*, 22,3% *CEB*, 31,1% *Depresiasi* dan

Tabel 5. Komposisi Total *Cost Recovery* (Dalam US\$ 000,000.00)

Tahun	<i>Cost Recovery</i>	<i>Direct OEB</i>	<i>Indirect OEB</i>	<i>OEB</i>	<i>Depr.</i>	<i>Other</i>
2010	700	413	(56)	99,4	245	(1,4)
2011	735	448,35	(68,36)	213,15	213,15	2,21
2012	654,15	352,59	(48,80)	203,44	203,44	1,05
2013	804,65	482,79	(80,47)	251,05	251,05	(1,61)

Sumber: PT Chevron Pacific Indonesia (Simulasi)

sisanya 0,16% *Other Income (Expenditure)*. Dan pada tahun 2007 *Cost Recovery* terdiri dari 60% *Direct OEB*, 10% *Indirect OEB*, 19% *CEB*, 31,2% *Depresiasi* dan sisanya 0,2% *Other Income (Expenditure)* (Kasman 2014).

Dari Tabel 5, juga dapat disusun kembali perbandingan persentase (%) antara total *pendapatan perusahaan*, *cost recovery* dan laba sebelum pajak (*net income before tax*) pada Tabel 6.

Setelah kita ketahui bagaimana hubungan antara *cost recovery* dengan *equity to be split*, yaitu melalui perhitungan *equity share* (% pembagian minyak mentah antara kontraktor dengan BP MIGAS) dan melalui perhitungan antara *cost recovery* dengan *equity to be split* dengan menggunakan regresi sederhana, sekarang kita melihat bagaimana hubungan antara *cost recovery*, *pendapatan perusahaan* dan NITB.

Tabel 5. Perbandingan (%) Total Pendapatan Perusahaan, *Cost Recovery* dan NOI

Tahun	Total Pendapatan perusahaan (%)	<i>Cost Recovery</i> (%)	NOI (%)
2010	100	47.8	52.2
2011	100	51.8	48.2
2012	100	63.5	36.5
2013	100	60.3	39.7

Dari Tabel 6 yaitu perbandingan antara total Pendapatan perusahaan, *Cost Recovery* dan NITB, tampak bahwa pada tahun 2010 Total Pendapatan perusahaan terdiri dari 47,8% *Cost Recovery* dan 52,2% NITB, pada tahun 2011 Total Pendapatan perusahaan terdiri dari 51,8% *Cost Recovery* dan 48,2% NITB, pada tahun 2012 Total Pendapatan perusahaan terdiri dari 63,5% *Cost Recovery* dan 36,5% NITB, dan pada tahun 2013 Total Pendapatan perusahaan terdiri dari 60,3% *Cost Recovery* dan 39,7% NITB (Kasman 2014).

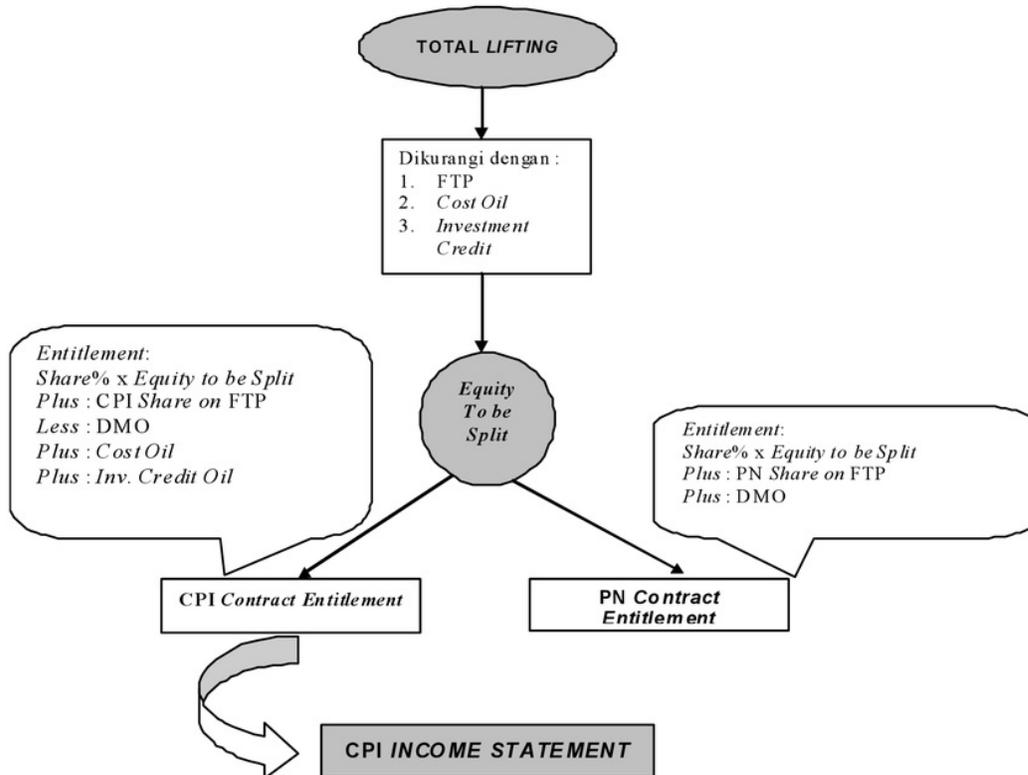
Pada Tabel 5 dilihat juga bahwa dari tahun 2010 ke tahun 2011 *Cost Recovery* naik jumlahnya sebesar 5% sehingga mengalami perubahan terhadap NITB, yaitu turun sebesar 10,5%. Sedangkan pada tahun 2012 *Cost Recovery* mengalami penurunan sebesar 11% dari tahun sebelumnya dan mempengaruhi perubahan terhadap NITB, yaitu penurunan sebesar 45%. Sedangkan pada tahun 2013 *Cost Recovery* naik sebesar 23% dan NITB sendiri mengalami kenaikan sebesar 41%.

Untuk melihat bagaimana hubungan dari ketiga point diatas, maka kita melihat kembali bagaimana proses pembagian minyak mentah antara Kontraktor dan Pemerintah, yang dapat digambarkan pada gambar 8.

Dari Gambar 8, maka dapat dilihat bahwa pendapatan (*pendapatan perusahaan*) PT CPI berasal dari pembagian dari *equity to be split (share % x equity to be split)*, di mana *equity to be split* merupakan hasil pembagian minyak bersih setelah dikurangi dengan FTP, biaya-biaya operasi selama produksi (*cost recovery*) dan *investment credit* yang telah dibiayai terlebih dahulu oleh kontraktor.

Equity to be split tersebut kemudian dibagi menurut besar persentase(%) pembagian antara PT CPI dan BP MIGAS yang kemudian menjadi hak/milik bagi masing-masing pihak atau yang disebut dengan *entitlement*.

CPI Contract Entitlement, terdiri dari persentase pembagian dari *equity to be split* ditambah dengan



Gambar 8. Proses Pembagian Minyak Mentah Antara CPI dan Pemerintah

pembagian persentase dari FTP dikurangi dengan DMO. Setelah itu *entitlement* kembali ditambah dengan penggantian biaya-biaya operasional dan penggantian dari *investment credit oil*, dengan demikian pendapatan yang telah menjadi hak/milik PT CPI telah termasuk didalamnya *cost recovery* dan *investment credit oil*.

Setelah itu baru dilaporkan ke PT CPI *income statement*, untuk menjelaskan berapa besarnya pendapatan, rincian-rincian biaya operasional yang kemudian total *contractor pendapatan perusahaan* dikurangi kembali dengan *cost recovery* yang menghasilkan laba sebelum dipotong pajak (*net income after tax*).

Dari Gambar 8 tampak bahwa keuntungan (laba) sangat tergantung pada besarnya *equity to be split* yang diperoleh, dan demikian pula halnya dengan *equity to be split* akan berhubungan erat dengan perubahan yang ditimbulkan oleh total biaya operasi (*cost recovery*). Apabila kita anggap *total lifting* konstan dari

tahun ke tahun, maka terlihat bahwa semakin besar perubahan *cost recovery* (naik) maka *equity to be split* yang akan dibagikan akan semakin kecil kuantitasnya, dengan demikian penerimaan pendapatan untuk PT CPI akan semakin turun. Begitu juga halnya dengan penurunan *cost recovery* dan dianggap *total lifting* konstan maka *equity to be split* yang akan dibagikan akan semakin besar sehingga kuantitas pembagian pun akan semakin besar.

Dampak Perubahan *Cost Recovery* terhadap *Government Take*

Hasil analisis menunjukkan bahwa *Cost Recovery* berpengaruh signifikan terhadap *government Take* adalah diterima. Koefisien jalur *standardize* = 0.426 dengan *P-value* = 0.001, dengan demikian diputuskan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan Sistem Fiskal terhadap *Cost Recovery*.

Dalam pemakaian yang paling umum di industri migas, istilah teori sewa ekonomi memunculkan perbedaan antara nilai produksi dan biaya utama. Biaya ini terdiri atas biaya eksplorasi, pengembangan dan biaya operasi sebagaimana halnya pembagian saham atas keuntungan yang diperoleh dari industri perminyakan. Sewa adalah kelebihan. *Economic rent* adalah sinonim dari kelebihan keuntungan. Pemerintah mencoba menangkap sebanyak-banyaknya *economic rent* yang memungkinkan berada pada berbagai retribusi, pajak, royalti dan bonus.

Penerimaan Pemerintah dari Kontrak *Production Sharing* atau Kontrak Kerja Sama bukan hanya dari pajak migas saja, tetapi juga dari bagi hasil sebelum pajak (dalam APBN disebut Penerimaan Negara Bukan Pajak) di samping pemerintah juga mendapatkan keuntungan dari DMO (*Domestic Market Obligation*) sehingga pemerintah bisa mendapatkan 20% dari menjual bagian kontraktor dengan hanya 10% harga pasar sesudah 60 bulan produksi. Dalam perhitungan pajak *capital di-recover* dengan depresiasi.

Dengan membaiknya tatanan sistem fiskal (*fiscal term*) dari kontrak kerjasama sektor migas di mana dalam setiap pengambilan kebijakan oleh pemerintah harus ada sinkronisasi kebijakan baik sistem fiskal, OTDA, keamanan, lingkungan, dan kepastian hukum agar pemborosan atau pengeluaran yang dapat diminatkan kembali oleh kontraktor dapat dilakukan pengendalian terhadap biaya-biaya, memaksimalkan tingkat efisiensi dalam produksi dan melakukan evaluasi terhadap perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia, yang pada akhirnya menekan tingkat pengembalian biaya.

Berdasarkan kondisi aktual hasil penelitian, saat ini belum ada sinkronisasi kebijakan di sektor hulu migas ini, sehingga untuk melakukan kontrol terhadap komponen biaya yang diminatkan kembali oleh kontraktor kontrak kerja sama belum dapat dikontrol dengan baik.

Pengelolaan hulu migas berdasarkan Undang-Undang diberikan kepada SKKMIGAS, hingga saat ini masih mencari pola atau bentuk untuk dapat melakukan kontrol terhadap *cost recovery* atau pengembalian biaya ini, atau dengan kata lain belum ada

perangkat yang dapat menjadi patokan dalam melakukan pengendalian terhadap *cost recovery* ini.

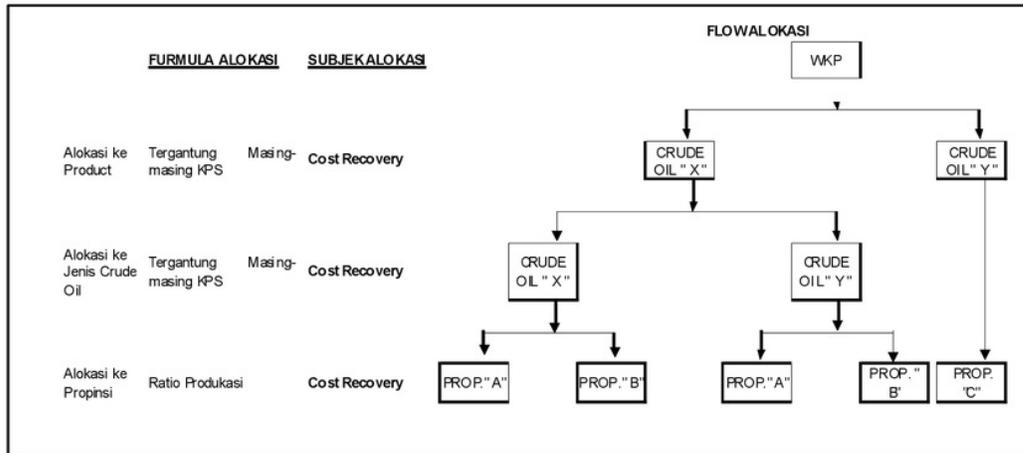
Model kontraktor kontrak kerja sama, Indonesia sampai generasi ketiga masih sangat sederhana, dan belum dapat merangsang kontraktor kontrak kerja sama untuk dapat meningkatkan penemuan ladang-ladang baru dan menambah investasi mereka di Indonesia.

Kontrak kerja sama wajib membuat beberapa ketentuan, antara lain kewajiban paska-operasi pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri, pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia, pengembangan masyarakat tempatan.

Berdasarkan UU No. 25/1999 pasal 6 ayat (6) ditekankan pada pengertian akan penerimaan negara yang berasal dari sumber daya alam minyak dan gas yang dihasilkan dari suatu wilayah kerja sebagai berikut: (a) Produksi yang menjadi pendapatan dalam terminologi kontrak kerja sama dalam industri migas adalah nilai *lifting*. (b) Hasil dari wilayah kerja merupakan produksi yang di *lifting* dengan pengertian bahwa wilayah daerah tidak selalu sama letaknya dengan wilayah kuasa pertambangan. (c) Penerimaan negara di sini mempunyai unsur biaya (pendapatan dikurangi biaya) dan pengertian biaya dalam kontrak kerja sama adalah menjadi satu kesatuan dalam satu wilayah kuasa pertambangan.

Salah satu yang menjadi subjek alokasi *Government Take* adalah pengembalian biaya atau *cost recovery*, karena pengembalian biaya ini merupakan komponen dari formula alokasi, sebagaimana terlihat pada Gambar 9.

Hasil penelitian dilapangan, menunjukkan bahwa pengaruh pengembalian biaya terhadap *Government Take* secara parsial dengan kondisi pendapatan perusahaan yang sama mengidentifikasi bahwa pengembalian biaya yang tinggi cenderung menghasilkan *Government Take* yang rendah atau lebih tinggi. Sedangkan ketidak pengaruhan pendapatan perusahaan terhadap *Government Take* menunjukkan bahwa pada kondisi pengembalian biaya yang sama, pendapatan perusahaan yang lebih tinggi tidak cenderung menghasilkan *Government Take* yang lebih rendah atau lebih tinggi. (Kasman 2014)



Gambar 9. Alur Alokasi Pembagian Migas

Sumber: Olahan Peneliti

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan masalah di atas, dapat diambil beberapa buah kesimpulan sebagai berikut: (1) *Cost recovery* sangat berpengaruh terhadap pendapatan perusahaan sebelum pajak. Semakin besar perubahan *cost recovery* maka akan semakin besar pengaruhnya terhadap perubahan nilai *equity share*, di mana *equity share* merupakan pendapatan (*revenue*) bagi PT CPI. (2) Apabila kita anggap total *lifting* konstan dari tahun ke tahun, maka terlihat bahwa semakin besar perubahan *cost recovery* (naik) maka *equity to be split* yang akan dibagikan akan semakin kecil kuantitasnya, dengan demikian penerimaan pendapatan untuk PT CPI akan semakin turun (begitu juga sebaliknya)

Saran

Pengaruh *cost recovery* terhadap *Government Take* secara parsial dengan kondisi pendapatan perusahaan yang sama mengidentifikasi bahwa *cost recovery* yang tinggi cenderung menghasilkan *Government Take* yang rendah. PT Chevron Pacific Indonesia merupakan perusahaan asing yang bergerak dalam bidang eksplorasi minyak bumi dan dalam menjalankan kegiatan operasinya, PT Chevron Pacific Indonesia telah diatur dalam suatu perjanjian kontrak

dengan Pemerintah Republik Indonesia (SKKMIGAS), yaitu kontrak *production sharing* atau *Production sharing contract* (PSC).

DAFTAR RUJUKAN

- Ditjen Perkebunan. 1995-2001. *Statistik Perkebunan*. Jakarta.
- Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan. 2002. *Statistik Perdagangan Bilateral*. Ditjen Bina Pengolahan & Pemasaran Hasil Pertanian. Deptan, Jakarta.
- Disbun Sumatera Utara. 2001. Laporan Tahunan Dinas Perkebunan 2001. Medan.
- FAO. 2000. *Data Produksi Sawit*. Roma.
- GAPKI. 1997-2002. *Laporan Bulanan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia*. Medan.
- Hadi, dkk. 2002. *Kajian Perdagangan Internasional Komoditas Pertanian Tahun 2001*. Kerjasama Proyek ARMP II dengan Puslitbang Sosek Pertanian. Bogor.
- Hadi, dkk. 1999. *Dampak Globalisasi Terhadap Produksi dan Perdagangan Kelapa Indonesia*. Bogor: Puslit Sosek Pertanian.
- Hutabarat, et al. 1996. *Prospek Peningkatan Daya Saing Komoditas Pertanian di Wilayah Pertumbuhan Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat*. Bogor: Puslit Sosek Pertanian.
- PT International Contact Business System (ICBS) Inc. 2000. *Studi Tentang Produksi, Pemasaran, Konsumsi dan Investasi Minyak Kelapa Sawit Indonesia*. Jakarta.

Rachman, *et al.* 2002. *Studi Pengembangan Sistem Agribisnis Perkebunan Rakyat Dalam Perspektif Globalisasi Ekonomi*. Bogor: Makalah Seminar Hasil Penelitian Puslitbang Sosek Pertanian.

Simatupang, P. 2002. *Daya Saing Komoditas Jagung*. Bogor: Puslitbang Sosek Pertanian.

Pengaruh Cost Recovery Terhadap Pendapatan Perusahaan dan Government Take pada PT Chevron Pacific Indonesia

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

8%

★ jurnaljam.ub.ac.id

Internet Source

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off